



Pengaruh Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

(Studi Empiris pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Suci Rahmadani, Sugiarto
STIE Cendekia Karya Utama

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* dalam mencegah adanya *fraud* dalam mengelola dana desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer bersifat *cross section* yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, dimana populasinya merupakan aparatur desa yang terlibat dalam pemerintahan desa pada 10 desa yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dari populasi tersebut dipilih menggunakan teknik *saturation sampling* diperoleh sampel dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam mengelola dana desa. Serta positif signifikan antara variable *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam mengelola dana desa.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, Pencegahan *Fraud*, Pengelolaan Dana Desa.

1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan berbadan hukum jika memenuhi beberapa syarat, salah satunya harus ada pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan negara dan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi negara, karena masyarakat berpartisipasi dalam memajukan negara. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membuat rakyatnya merasa aman, damai dan sejahtera.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak ke empat didunia setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga Indonesia memiliki banyak tugas untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk pelayanan di setiap daerah dengan tujuan untuk



mencapai kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat. Salah satu pelayanan publik yang dibentuk pada garda paling bawah adalah pemerintah desa.

Desa menjadi jembatan bagi pemerintah yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Keberadaan desa dapat mendorong kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan ditingkat desa. Alokasi diperlukan untuk mendukung pembangunan desa. Salah satu dana yang dialokasikan ke desa adalah Anggaran Dana Desa (ADD). Dana tersebut merupakan sumber dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang akan diberikan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tujuan pengalokasian dana tersebut adalah untuk mendorong tata kelola, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja, jumlah uang di setiap desa berbeda-beda. Hal itu terjadi karena jumlah dana yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan luas wilayah.

Menurut Finants.detik.com, anggaran dana desa meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tahun 2018 pemerintah menyetor sebesar Rp 60 triliun ke dalam anggaran dana desa. Dan ditahun 2019 anggaran desa naik 16,5% sehingga menjadi Rp 70 triliun. Sedangkan ditahun 2020 anggaran desa naik 2,8% sehingga menjadi Rp 72 triliun. Peningkatan anggaran dapat memiliki efek positif dan negatif. Positifnya, pembangunan desa dapat dilakukan secara optimal. Sisi negatifnya adalah meningkatkan anggaran juga dapat meningkatkan tindakan *fraud*. *Fraud* adalah tindakan yang disengaja dan melawan hukum dimana tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu. Tindakan ini dapat berupa *fraud* atas laporan keuangan, *fraud* atas penyelewengan aset, dan korupsi.

Meningkatnya kasus *fraud* atas dana desa ditunjukkan dengan kasus korupsi di kas desa yang muncul pada tahun 2019, hingga 271 kasus yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Negara menderita kerugian sebesar 32,3 miliar akibat insiden itu. Banyaknya kasus *fraud* dapat mencerminkan internal control yang lemah dan *good corporate governance*, dan terlalu banyak dana dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Salah satu caranya adalah dengan mencegah *fraud*. Pencegahan *Fraud* adalah suatu tindakan atau upaya untuk mencegah atau



menekan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Menurut COSO, *fraud* dapat dicegah dengan pengendalian internal yang baik dan kuat. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh semua anggota organisasi secara teratur untuk memastikan bahwa organisasi telah mencapai tujuannya. Pengendalian internal juga digunakan sebagai pencegah *fraud* dalam penanganan dana desa. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat memperkecil peluang individu untuk melakukan kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Laksmi dan Sujana (2019), Fatmah dan Harjanti (2019) yang mengatakan dengan memperkuat pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ony dan Rio (2016), Usman, at all (2015) hasil penelitian mereka menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Artinya pengendalian internal bukan hal utama yang menjadi cara untuk melakukan pencegahan *fraud*.

Langkah antisipasi *fraud* lainnya adalah penerapan *good corporate governance* (GCG). GCG menjadi acuan dalam pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Suatu organisasi dapat meminimalisir terjadinya *fraud* apabila dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Hal ini karena GCG bertujuan untuk transparansi, nondiskriminasi, tanggung jawab yang jelas dan kontrol masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Cecilia dan Komang (2019) yang menunjukkan hasil bahwa dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip GCG dengan efektif maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Serta didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusman Soleman (2013) yang menyatakan bahwa GCG memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Patriarini (2018) yang menyatakan menjalankan GCG tidak akan berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Setiap desa menerima sekitar 2 (dua) miliar dana desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana yang baik untuk melaksanakan program kerja pemerintah. Karena masih banyak kasus *fraud* dan terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pencegahan *fraud*. Dengan demikian, peneliti memiliki keinginan untuk menguji variabel dalam penelitian ini.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul mengenai **“Pengaruh Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

2. Telaah Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah kontrak dalam hubungan antara dua pihak atau lebih. Sementara pihak pertama dianggap prinsipal, yang perannya biasanya memberi perintah, mengontrol, mengevaluasi, dll., Pihak kedua adalah agen, yang biasanya berkewajiban untuk melakukan dan menerima kewajiban berdasarkan kontrak. kontrak perintah prinsipal. Seorang prinsipal mendelegasikan manajemen perusahaannya kepada tim manajemen. Pada umumnya pemegang saham menginginkan perusahaan menjadi makmur, tetapi manajer biasanya berusaha mengambil tindakan yang memaksimalkan kepentingan pribadinya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, teori ini beranggapan bahwa setiap individu mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan juga dapat diterapkan pada organisasi publik. Dalam teori ini, pemerintah daerah ditempatkan sebagai agen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan masyarakat sebagai pelaku yang hanya dapat menerima informasi. Hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi, suatu situasi di mana satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain. Kehadiran situasi seperti itu dapat membuka peluang bagi agen untuk melakukan penipuan. Dalam penelitian ini yang menjadi wakil adalah pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber dana desa, sedangkan pengelola diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengendalian Internal

Menurut teori keagenan, untuk mengurangi asimetri informasi, perlu dilakukan peningkatan pengendalian internal terhadap aktivitas organisasi.



Mengurangi asimetri informasi dapat meminimalkan risiko *fraud* dalam organisasi. COSO juga mengatakan bahwa pengendalian internal adalah langkah pertama dalam mencegah tindakan *fraud*. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh semua anggota organisasi secara teratur untuk memastikan bahwa organisasi telah mencapai tujuannya. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai keandalan laporan keuangan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, dan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Rizky Dwi Melani, 13). Pengendalian internal dapat dilakukan baik dengan organisasi publik maupun swasta. Di sektor publik, pengendalian internal dikenal dengan SPIP, atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP memiliki tujuan tersendiri, antara lain memastikan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, memastikan keamanan aset publik, memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan, memastikan keandalan pelaporan keuangan. mempercayai SPIP diatur dengan peraturan pemerintah yaitu UU No. 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari lima bagian yaitu:

a. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian)

Dalam suatu organisasi menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif menjadi suatu kewajiban, termasuk instansi pemerintah. Dalam organisasi pemerintah seorang pemimpin akan menentukan keberhasilan organisasinya. Oleh karena itu pemimpin berupaya untuk mewujudkan misi dan visi organisasinya. Salah satu cara untuk mendukung keberhasilannya yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif.

b. *Risk Assessment* (Penilaian resiko)

Penilaian resiko yang dimaksud dalam unsur ini yaitu identifikasi resiko dan analisis resiko, dimana yang wajib melakukan hal tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah.

c. *Control Activities* (Kegiatan pengendalian)

Dalam control activities biasanya dilakukan dengan cara memberikan bimbingan terhadap sumber daya manusia, melakukan pengendalian



terhadap mengelola suatu sistem informasi, dan melakukan review rutin terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu periode.

d. *Information and Communication* (Informasi dan komunikasi)

Information and Communication ini wajib diselenggarakan secara efektif. Agar dapat terselenggarakan secara efektif, maka pimpinan instansi harus mempersiapkan dan menggunakan dengan baik media komunikasi. Serta pimpinan harus selalu mengupdate tentang sistem informasi terbaru.

e. *Monitoring Activities* (Kegiatan Pemantauan)

Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara terpisah, melakukan pemantauan yang dilaksanakan secara rutin, dan menindaklanjuti hasil dari audit yang dilakukan. Dalam pemerintah desa pelaksanaan pengendalian internal dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

a) Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan terdapat beberapa hal yang harus dijalankan, yaitu:

1. Kepala desa harus membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyelenggaraan SPIP. Satgas ini bertujuan untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
2. Membangun kesadaran dan pengetahuan terkait dengan SPIP yang dilakukan dengan cara sosialisasi, diseminasi, dan diklat SPIP.
3. Melakukan pemetaan dengan maksud untuk mengetahui kondisi pengendalian internal pada pemerintah desa yang mencakup keberadaan dan implementasi kebijakan dan prosedur.
4. Menyusun kerangka kerja dalam melaksanakan pengendalian internal.

b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan terdapat tiga tahapan yaitu pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan.



1. Pembangunan Infrastruktur, mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur maupun memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam AOI.
 2. Internalisasi, merupakan proses yang dilakukan unit kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai.
 3. Pengembangan Berkelanjutan, Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya.
- c) Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

1. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan;
2. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut;
3. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
4. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya

Good Corporate Governance (GCG)

Teori keagenan menyatakan bahwa GCG memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Hal ini dilakukan karena perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan organisasi sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pengelolaan organisasi yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diberikan.



Good Corporate Governance adalah aturan yang berguna untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan melalui pengelolaan dan pengendalian perusahaan, dengan tujuan bertahan dalam nilai tukar pemegang saham untuk waktu yang lama dan selalu memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. . Sistem GCG diterapkan tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh pemerintah. *Good Corporate Governance* pemerintahan adalah proses hubungan sosial dan politik di mana pemerintah dan rakyat berpartisipasi. Penerapan GCG akan sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Lima prinsip *good corporate governance* yang baik diterapkan dalam pemerintahan desa:

a. *Transparansi*

Suatu organisasi diwajibkan untuk menyajikan informasi yang mudah diakses serta dipahami yang tujuannya untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Dalam pemerintah desa proses transparansi dimulai dari kegiatan musyawarah bersama masyarakat yang tujuannya untuk memberikan saran serta masukan terhadap program kerja yang akan dijalankan.

b. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah salah satu syarat agar dapat mewujudkan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu suatu organisasi wajib melakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya secara *transparent* dan wajar. Dalam mempertanggungjawabkan dana desa, setiap pemerintah desa harus mampu untuk memberikan laporan yang sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Untuk mendukung proses pertanggungjawaban yang transparan, pemerintah desa menyediakan papan pengumuman yang tujuannya untuk memberikan informasi seputar kegiatan dana desa.

c. *Responsibility*

Suatu organisasi dapat di akui sebagai *good corporate citizen* jika organisasi tersebut patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.



d. Independensi

Dalam pemerintah desa harus dikelola dengan cara independent yang bertujuan untuk tidak ada sikap yang saling menguasai dan tidak terpengaruh oleh pihak lainnya.

e. *Fairness*

Dalam pemerintah desa kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara, serta pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai desa dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan.

Fraud

Apabila *internal control* dan *good corporate governance* lemah dapat menimbulkan peluang bagi pelaku dalam melakukan *fraud*. *Fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindakan tercela yang dilakukan seseorang dengan sengaja, yang mana perbuatan tersebut akan berdampak negatif bagi korban yang dirugikan dan akan memberikan keuntungan bagi pelaku *fraud*. Menurut para ahli terdapat 3 jenis *fraud* (Silviana Pebruary, dkk, 59), yaitu:

1) *Fraud* atas Laporan

Fraud atas laporan sering dilakukan dengan menggunakan cara mencatat lebih tinggi atas akun harta dan pendapatan. *Fraud* atas laporan ini dilakukan karena terdapat tekanan yang kuat dari atasan. Hal ini dilakukan supaya perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus dan mencapai target. Oleh karena itu dibutuhkan proses pelaporan yang jelas dan terarah. Proses pelaporan dapat didasari oleh suatu konsep yang di tuangkan ke dalam dokumen resmi. Dengan adanya laporan setiap periode dapat dijadikan acuan dalam evaluasi di akhir periode.

2) Penyalahgunaan Aset

Asset merupakan suatu kemampuan secara ekonomi dimasa depan yang dipunyai oleh suatu organisasi (Dwi Koerniawati, 10) . Penyalahgunaan asset biasanya dikelompokkan dalam 2 macam *fraud*, yaitu: (a) *cash fraud* yang dimaksud ialah mencuri kas atau kas keluar dengan cara curang sebagai contoh memalsukan cek. (b) kecurangan atas persediaan dan aset lain, yang dimaksud adalah kecurangan berupa pemakaian dan



pencurian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

3) Korupsi

Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang dilakukan diluar pembukuan. Korupsi biasanya dilakukan dengan cara pemberian hadiah, penambahan komisi dan sebagainya. Korupsi terbagi menjadi tiga, yaitu (a) pertentangan kepentingan yang merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika pekerja mempunyai kepentingan pribadi terhadap suatu transaksi yang nantinya akan berdampak negatif bagi perusahaan. (b) Suap yang merupakan pemberian, penawaran permohonan ataupun penerimaan sesuatu yang memiliki tujuan guna memengaruhi pembentukan keputusan. (c) pemberian ilegal yang merupakan pemberian yang menyerupai suap tetapi tidak memiliki maksud untuk mempengaruhi pembentukan keputusan karena pelaku hanya mempermainkannya saja. (d) pemerasan secara ekonomi yang dimaksud adalah penjual menawarkan untuk memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaannya.

Karena tindakan *fraud* dapat menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi maka perlu dilakukan tindakan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Ada beberapa faktor dalam mencegah terjadinya *fraud* yaitu memperkuat pengendalian internal, membentuk suasana kerja yang terbuka, menerapkan kejujuran dalam berbagai hal, saling memberi dukungan antar pekerja, dan melenyapkan peluang terjadinya *fraud*.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) kasus korupsi merupakan kasus dengan peringkat pertama di Indonesia yang paling merugikan negara, sebanyak 167 kasus korupsi ditahun 2019. Salah satu korupsi yang dilakukan yaitu korupsi dana desa (Survei Fraud Indonesia 2019.(ACFE Indonesia Chapter: Jakarta, 2020), 15). Dana desa merupakan 38 bantuan sejumlah uang yang dikucurkan untuk desa yang



dikirim melalui APBD. Pengelolaan dana tersebut berfokus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Buku Saku Dana Desa, (2017), 7). Terdapat beberapa syarat dalam pengelolaan dana desa yaitu:

- 1) Seluruh aktivitas yang memakai dana desa harus dirancang, dikerjakan, dan di evaluasi secara transparent.
- 2) Semua kegiatan wajib memiliki sifat akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum dan teknis.
- 3) Pelaksanaan dana desa wajib memakai prinsip efektif, efisien, terencana, teratur serta harus selesai tepat waktu.
- 4) Semua kegiatan harus dilaksanakan secara transparent agar dapat mengembangkan sarana pelayanan masyarakat desa berbentuk pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat yang mana hal tersebut diputuskan melewati musyawarah desa.
- 5) Dana desa wajib tercatat pada APBDesa dan proses penganggarannya harus berpacu peraturan yang berlaku .

Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan dana menurut G.R Terry:

- 1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini kegiatan alokasi dana desa diawali dengan pembentukan tim perencana, pelaksana dan pengawasan.
- 2) Tahap Perencanaan, dalam tahap ini akan membuat rencana program kerja yang akan dijalankan selama satu periode. Serta membuat anggaran untuk program kerja.
- 3) Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini program kerja yang telah direncanakan akan berjalan atau dijalankan.
- 4) Tahap Pengawasan, dalam tahap ini pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan untuk administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan.
- 5) Tahap Pelaporan Pekerjaan, dalam tahap ini jika proses pekerjaan telah selesai maka wajib membuat atau Menyusun laporan akhir. Laporan dapat dilengkapi dengan dokumentasi secara administrasi dan foto kegiatan.



Berlandaskan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU BPK, dana desa merupakan suatu dana yang bersumber pada keuangan negara, sehingga BPK wajib memeriksa penggunaannya. Dengan demikian kepada desa wajib membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang dana desa yang telah digunakan pada Badan Pengawas Keuangan. Hal tersebut dilakukan karena dana desa bersumber dari APBN yang mana dana tersebut harus terealisasi dan dilaporkan dengan jelas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang tertata dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan (Muslich, Anshori, Sri Iswati,). Penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut akan digunakan untuk menguji suatu hipotesis, serta untuk menjawab rumusan masalah dari suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas dengan adanya bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa.

4. Hasil Penelitian.

Objek penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Populasi penelitian ini adalah 10 (sepuluh) desa yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersifat *cross section* yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner.

Untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan metode *saturation sampling*. Metode tersebut digunakan dengan pertimbangan tertentu dan telah disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini. Sehingga dapat menjawab permasalahan pada penelitian dan dapat memberikan hasil yang representative.

Karakteristik Sampel Penelitian

Berdasarkan teknik *saturation sampling* sampel adalah suatu karakteristik yang mewakili masyarakat dan pada penelitian ini sampel yang dipakai yaitu seluruh perangkat desa. Berdasarkan karakteristik yang ditentukan, diperoleh 100 orang



perangkat desa dalam 10 desa yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang setiap desa nya diambil 10 responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji statistik F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasikan maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1 , X_2 , dan X_3 (Ghozali, 2016:96). Berikut adalah hasil dari uji F :

Tabel.4.1.
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regres sion	1839.798	2	919.899	109.202	.000 ^b
	Residu al	817.112	97	8.424		
	Total	2656.910	99			
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Pengendalian Internal						

Sumber data : *output* SPSS, diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 109,202 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t yaitu sebagai berikut :



Tabel 4. 2
Uji – t (Parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.	1.810		3.	.001		
	Pengendalian Internal	.7	.130	.461	5.	.000	.453	2.20
	Good Corporate Governance	.6	.127	.431	5.	.000	.453	2.20

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber data : *output* SPSS 25, diolah tahun 2022

1) Uji t terhadap variabel Pengendalian Internal

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengendalian internal (X^1) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y). Dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ menunjukkan bahwa H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2) Uji t terhadap variabel *Good Corporate Governance*

Hasil Hipotesis kedua menyatakan bahwa *good corporate governance* (X^2) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y). Dari hasil pengujian dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti $< 0,05$ menunjukkan bahwa H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Berikut adalah hasil koefisien determinasi :



Tabel 4. 3
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.692	.686	2.902
a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Pengendalian Internal				
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa				

Sumber data : *output SPSS 25*, diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* yaitu 0,686 atau 68,6%, yang artinya kemampuan variabel pengendalian internal dan *good corporate governance* dapat memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 68,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,4% (100% - 68,6%) dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

5. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung prediksi teori keagenan bahwa semakin efektif pengendalian internal maka semakin kecil kemungkinan adanya *fraud*. COSO juga mengatakan pengendalian internal adalah langkah pertama dalam dalam pencegahan *fraud*.
2. *Good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung prediksi teori keagenan, teori ini menyatakan bahwa *good corporate governance* berperan penting dalam mengelola pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan perlunya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran-saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pemerintah desa dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pengendalian internal dan *good corporate governance*. Dengan



menitikberatkan kepada kedua variable ini, dapat mengurangi kemungkinan atau peluang bagi pelaku *fraud* untuk menjalankan aksinya.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menambah variable lain seperti *whistleblowing system* dan *organizational culture*, sebab variable ini dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kecurangan, maka dapat menjadi faktor baru dalam pencegahan *fraud*.

5.3. Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu;

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yaitu; pengendalian internal dan *good corporate governance*. Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara dan interview.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantawikrama dan Komang, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, (2017), 9.
- Anantawikrama dan Komang, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, (2017), 9.
- Anantawikrama dan Komang, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, (2017), 7.
- Anantawikrama dan Komang, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, (2017), 9..
- Anita Ardiyanti, dkk, “Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang”, Jurnal Akuntansi Manajerial, (2018), 1.
- Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 50.
- Cecilia dan Arthana, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang”, Jurnal kuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, (2019), 122.



- Dwi Koerniawati, “Analisis Konsistensi Laporan Keuangan Pada Industri Manufaktur di BEI”, (Tesis--Universitas Airlangga, 2016), 2.
- Eka, “Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor Terhadap Pendeteksi Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) Di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 61.
- Fatmah Karunia Hidayati dan Harjanti Widiastuti, “Pengaruh Pengendalian dan Good Governmen Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan”, The 6th Call For Syariah Paper, (2019).
- Feby, Priswita dan Salma Taqwa, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap K?..eML/L;L, curangan Laporan Keuangan”, Jurna; Eksplorasi Akuntansi, (2019), 1705.
- Feby, Priswita dan Salma Taqwa, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”, Jurna; Eksplorasi Akuntansi, (2019), 1705.
- Ghozali, I. 2012. “Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 2”. Semarang. UNDIP
- Ghozali, I. 2016. “Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23”. Edisi ke-8. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kinasih Tri Patriarini, “Pengaruh Peran Auditor Internal, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan”, (Skripsi--Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2018).
- Laksmi dan Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, (2019), 2159
- Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar”, Among Makarti, (2018), 119
- Melani, Rizky Dwi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, (Skripsi—Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2017).
- Michael, etc, “Theory Of The Firm: Managerial Behavioer, Agency Cost and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, (1976), 308.
- Micheal C. Jensen and William H. Meckling, “Theory Of he Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics 3, (1976).
- Ni Putu Rika, dkk, “Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar”, E-Jurnal Akuntansi, (2019), 1301.
- Ni Putu Yulia Paramitha, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, (2020), 39.
- Ni Putu Yulia Paramitha, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, (2020), 23.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.
- Ratri, Rahma Frida, “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII)”, (Skripsi—Universitas Airlangga, 2016), hlm 56..
- Rino Pandu Wibowo. 2018. “Pengaruh Peenerapan Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa” (Skripsi—Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018)
- Rizki dan Ahmad, “Internal controls in fraud prevention effort: a case study”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, (2016), 127.
- Rizky Dwi Melani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”, (Skripsi—Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2017), 12.
- Rizky Dwi Melani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”, (Skripsi—Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2017), 12. 57.
- Rusman Soleman, “Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, (2013), 71.
- Rusman Soleman, “Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, (2013), 57.
- Silas Roberto, dkk, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara”, *Journal of Indonesia Development and Economics Analysis*, (2015), 2089
- Siti Aida Faradisha, “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AKK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”, (Skripsi— Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), 47
- Sitti, Fatratul Jannah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Akuntansi AKRUAL*, (2016), 177.
- Sugiyono. 2011. “Metode Penelitian Pendidikan”. Bandung, Alfabeta
- Survei Fraud Indonesia 2019.(ACFE Indonesia Chapter: Jakarta, 2020), 15
- Taufeni Taufik, “The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, (2019), 2163.
- Zainutul, Mufarrikoh, *Statistika Pendidikan (Konsep Sampling dan Uji Hipotesis)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 39.